

POTENSI KECAMATAN SALEM DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH

Caroline

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Fatah Demak
Sultan Fatah Nomor 83 Demak 59516 Jawa Tengah Indonesia Telepon +62-291-681024
E-mail: carolinehamboro@yahoo.com

Abstract: Several factors contribute significantly in implement regional autonomy is a good human resources, sources of local revenue, as well as the organization and good management. Salem subdistrict in this study is one of the region in Brebes district that has a lot of potential economic wealth, natural resources, and human resources that can be developed better to increase local revenues. This study used SWOT analysis and Subdistrict Allocation Funds (ADK). SWOT Analysis is used to compare between internal factor and external factor. After a thorough analysis, the results showed that Salem subdistrict is in third strategic position. It means the development of subdistrict needs to consider factors that influence both internally and externally and integrated. The program will be developed covering aspects: human resources, land use, economic, educational facilities, health facilities, electricity networks, telephone networks, drainage networks, water networks, and road network.

Keywords: local revenues, local autonomy, SWOT, district development

Abstrak: Beberapa faktor yang berperan secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah adalah sumber daya manusia yang baik, sumber pendapatan daerah, serta organisasi dan manajemen yang baik. Kecamatan Salem dalam penelitian ini merupakan salah satu dari wilayah di Kabupaten Brebes yang memiliki banyak potensi kekayaan ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan analisis Alokasi Dana Kecamatan (ADK). Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal. Setelah melalui proses analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan Salem menduduki posisi strategis ketiga artinya pengembangan kecamatan perlu memperhatikan faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dan terintegrasi. Program-program yang akan dikembangkan meliputi aspek: sumberdaya manusia, penggunaan lahan, perekonomian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase, jaringan air bersih, dan jaringan jalan.

Kata kunci: pendapatan daerah, otonomi daerah, SWOT, pembangunan kabupaten

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu: *Fungsi alokasi* yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; *Fungsi distribusi* yang meliputi: pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan

pembangunan; *Fungsi stabilitas* meliputi: pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sumber peneri-

maan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan PAD Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Salem dapat dilakukan dengan upaya melakukan studi potensi kecamatan. Sehingga dengan adanya studi potensi kecamatan Salem diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Brebes dapat meningkat serta mampu membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Mengingat suatu daerah yang tidak mampu membiayai sumber pembiayaan otonomi daerah akan digabungkan/*merger* atau dihapuskan. Seperti tersirat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi formulasi pembangunan di setiap kecamatan se wilayah kabupaten Brebes, merumuskan model/pola formulasi pembangunan kecamatan yang sesuai dengan kondisi yang ada, menyusun program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang sesuai dengan model formulasi di masing-masing kecamatan, dan merumuskan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan di masing-masing kecamatan.

Landasan Hukum. Landasan hukum dalam penyusunan studi potensi kecamatan Salem kabupaten Brebes antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Penyelenggaraan Pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 10 ayat (4), ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa. sebagai konsekuensinya, desa berhak menerima dari

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan isi Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan desa mencakup: (a) urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan (d) urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Mengenai tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Pasal 207 UU No. 32 Tahun 2004). Sedangkan tugas dan kewajiban kepala desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak dijabarkan secara rinci, hal ini tertuang dalam Pasal 208, yang menyatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 101 menyatakan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah: memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, telah diatur tentang sumber-sumber pendapatan desa. Dalam Pasal 212 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa; bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan. Desentralisasi telah menawarkan suatu kesadaran (*consciousness*) kepada kita bahwa ke depan, pembangun-

an harus dijiwai dan mengkomodasikan nilai-nilai lokal, kultural, dan sejarah masyarakat setempat ke dalam bentuk partisipasi yang seluas-luasnya. Proses percepatan desentralisasi dan otonomi daerah hingga hari ini masih dihadapkan banyak kendala yang menjadi beban bagi pemerintah, hingga menyentuh pada tataran pemerintahan di tingkat desa.

Memahami desentralisasi desa sebagai sebuah proses, dimaksudkan untuk menemukan dan merumuskan langkah-langkah konkrit yang harus ditempuh agar pemahaman desentralisasi desa dengan berbagai konsekwensinya (keuntungan dan kerugian) dapat dipahami dan segera diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat desa, permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, antara lain: terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

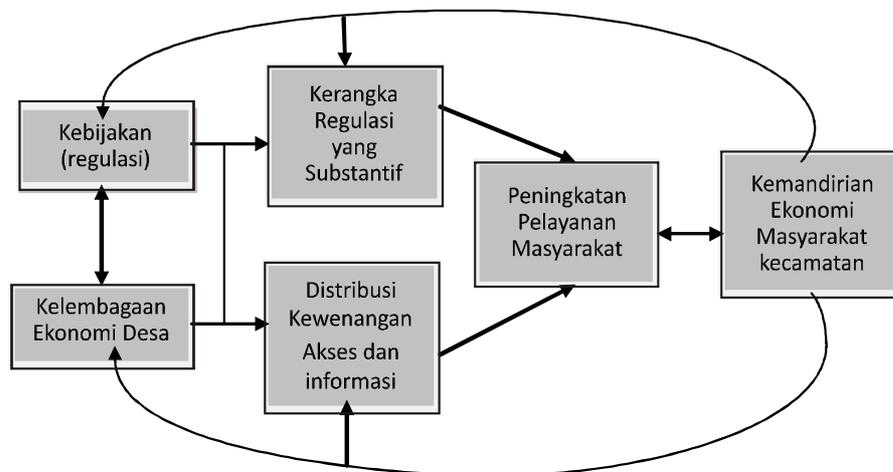
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang; segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terse-

but; menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti institusi ini mengarahkan kepada "penerima manfaat", dan secara sosial ekonomi mampu "memandirikan" desa.

Kemudian kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Alokasi Dana Kecamatan (ADK). Dalam penjelasan Pasal 212, Pendapatan Asli Desa sesuai ayat (3) huruf a, meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Sedangkan penjelasan untuk huruf d, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Penjelasan untuk huruf e, yang dimaksud dengan "Sumbangan dari pihak ketiga" dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh desa dalam wilayah kabupaten hendaknya didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan



Gambar 1. Keuangan dan Ekonomi

an sesuai dengan kewenangan yang diemban masing-masing desa, serta kemampuan (potensi ekonomi) yang dimiliki. Pada dasarnya ADD merupakan dana perimbangan dengan tujuan membantu daerah yang lebih rendah (untuk studi ini adalah desa) dalam menutup gap/perbedaan antara kebutuhan fiskalnya (*fiscal needs*) dan kemampuan fisiknya (*fiscal capacity*). Untuk itu pembagian dana hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan yang harus dilaksanakan (*money should follow the function*). Kewenangan desa meliputi kewenangan asli berdasarkan asal usul desa dan kewenangan tambahan, yang dilimpahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi dan ingin dilaksanakan oleh desa.

Untuk melaksanakan kewenangan asli dan kewenangan yang dilimpahkan, pemerintah desa membutuhkan dana (*fiscal needs*). Kebutuhan fiskal pemerintah desa tercermin dari jumlah dan kualitas kewenangan yang harus dilaksanakan, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, luas wilayah (termasuk aksesibilitas), serta standar minimum dari kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah/pembangunan desa. Kemampuan ekonomi (*fiscal capacity*) desa, tercermin dari potensi ekonomi desa, antara lain terlihat dari jumlah nilai kekayaan desa dan tanah kas desa (hondo desa), hasil pungutan retribusi desa, hasil pungutan dari pelayanan administrasi serta hasil usaha milik desa dan kekayaan lain-lain berikut kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa.

Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang "Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa", dijelaskan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Dalam SE tersebut agar bupati/walikota menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dari hasil pajak daerah kabupaten/kota

paling sedikit 10 persen untuk desa untuk di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) dari retribusi kabupaten/kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota antara 5 persen sampai dengan 10 persen sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Persentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, misalnya sebesar 60 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan jumlah ADD 40 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dari jumlah ADD. Pembagian ADDP dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

(5) Rumusan besaran Alokasi Dana Desa dan penyalurannya ke kas desa, lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut di atas, setiap kabupaten/kota perlu segera mengimplementasikan formula alokasi dana desa atau melakukan reformulasi penghitungan/pembagian ADD, tidak lagi menggunakan kesamaan jumlah dalam mengalokasikan dana desa. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/286/SJ tertanggal 17 Pebruari 2006 tentang "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa". Untuk itu, studi ini diharapkan memberi solusi bagi pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyusun formula dalam pembagian Alokasi

Dana Desa (ADD) desa berdasarkan azas merata dan adil, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan membantu percepatan pembangunan bagi desa yang kondisinya kurang mampu dibanding desa yang lebih mampu (percepatan akselerasi pembangunan).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Populasi dalam studi ini meliputi kecamatan Salem di kabupaten Brebes. Pada studi ini tidak dilakukan sampling, dalam arti seluruh kecamatan mencakup desa dimensi yang membentuk kecamatan akan dikaji. Sebagai responden studi ini adalah seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, BPD, dan camat.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder.

(1) Pengumpulan data primer dilakukan melalui: (a) *Focus Group discussion* (FGD) dan *meta plan* (kartu ide). (b) Wawancara mendalam untuk menggali informasi individual dari para tokoh/pejabat. (c) Kontemplasi kritis dan observasi (ekspresi tubuh) untuk wawancara dengan

kelompok perempuan dan warga miskin dan biasa.

(2) Pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari data monografi desa, data bersumber dari Kantor Statistik Kecamatan (dalam bentuk Kecamatan dalam Angka) dan BPS Kabupaten (Kabupaten Brebes dalam Angka), data Potensi kecamatan.

Teknik Analisis Data

Analisis SWOT. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Opportunities, Weakness, Threats*). Analisis ini mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pengembangan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal (Rangkuti, 2002)

Kemudian dilakukan penilaian (bobot dan rating) faktor eksternal dan internal yang disajikan pada *Tabel 1*.

Analisis ADK

Selain memperhatikan tujuan dan indikator yang dapat dipakai sebagai parameter pendis-

Tabel 1. Matrik Faktor Strategi Eksternal

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (1)	BOBOT (2)	RATING (3)	BOBOT X RATING (4=2x3)	KOMENTAR (5)
PELUANG				
Uraian yang berisi mengenai peluang-peluang yang terdapat di lokasi studi dan dapat dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah	X	Y	XY	Catatan yang berisi mengenai alasan faktor-faktor tertentu yang dipilih
ANCAMAN				
Uraian yang berisi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi potensi pengembangan ekonomi daerah	X	Y	XY	Catatan yang berisi mengenai alasan faktor-faktor tertentu yang dipilih

Keterangan: (1) Bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 3 (sangat penting) sampai dengan 1 (tidak penting). Faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. (2) Rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 3 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor terhadap kondisi lokasi yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +3, tetapi jika peluangnya lebih kecil diberi rating +1). Sedangkan pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 3.

Tabel 2. Matrik Faktor Strategi Internal

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating (4=2x3)	Komentar
(1)	(2)	(3)	(4=2x3)	(5)
KEKUATAN				
Uraian yang berisi mengenai potensi yang dimiliki oleh lokasi studi yang dapat dikembangkan lebih lanjut	X	Y	XY	Catatan yang berisi mengenai alasan faktor-faktor tertentu yang dipilih
KELEMAHAN				
Uraian yang berisi mengenai kendala-kendala yang dimiliki oleh lokasi studi yang menimbulkan permasalahan dalam pengembangannya	Y	Y	XY	Catatan yang berisi mengenai alasan faktor-faktor tertentu yang dipilih

Keterangan: (1)Bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 3 (sangat penting) sampai dengan 1 (tidak penting). Faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. (2)Rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 3 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor terhadap kondisi lokasi yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +3 (sangat baik). Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. (3) Setelah dilakukan penilaian faktor eksternal dan internal kemudian dilakukan penyusunan strategi dan skala prioritas dari hasil analisis faktor eksternal dan internal.

Tabel 3. Matriks Strategi SWOT

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EFAS	Faktor kekuatan Internal	Faktor Kelemahan Internal
OPPORTUNIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Faktor Peluang Eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
TREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Faktor Hambatan Eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

tribusian ADK, bentuk formula pembagiannya pun harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga hasil formulasi tersebut mudah diaplikasikan dan tidak bertentangan dengan tujuan dari desentralisasi desa yang melebar dalam kecamatan. Artinya, formulasi FPK tersebut harus mendorong semangat desentralisasi, adil dan transparan, sederhana, pasti dan dapat diprediksi, netral, memberikan insentif bagi kecamatan penerima, dan menghindari kecenderungan terciptanya sentralisasi kekuasaan di tingkat kabupaten.

Atas dasar pertimbangan poin-poin tersebut di atas, maka formulasi pertimbangan dana

yang disusun harus memasukkan unsur pemerataan dan unsur keadilan. Oleh karena itu, formula ADK yang diadopsi Maryunani, *dkk* (2002) (lihat persamaan (1) dan (2) di bawah ini) tampak sekali menggambarkan adanya dua komponen yang mempengaruhi, yaitu komponen tetap (ADM) untuk tujuan pemerataan dan komponen Variabel (ADV) untuk tujuan keadilan.

Komponen tetap adalah dana minimum yang diterima oleh kecamatan dan besarnya sama untuk setiap kecamatan. Sedangkan komponen variabel adalah bagian FPK yang diterima oleh kecamatan dan besarnya tergantung

dari posisi relatif desa yang bersangkutan terhadap keseluruhan desa di wilayah kabupaten. Oleh karena itu besarnya ADK dari komponen variabel yang diterima oleh setiap kecamatan kemungkinan besar tidak akan sama.

Bentuk formula untuk menghitung besarnya ADJ, menurut Maryunani (2002) adalah sebagai berikut:

$$ADK_i = ADM + (B_{di} \times ADV) \quad (1)$$

Penjelasannya: **ADK_i** adalah ADK untuk kecamatan ke *i*; **ADM** adalah Dana Alokasi Minimum (dibagi rata untuk seluruh kecamatan); **ADV** adalah Total ADK yang bersifat variabel

$$ADK = ADM + ADV \quad (2)$$

Sedangkan untuk menentukan Bobot Kecamatan ke *i*, formulanya:

$$BK_i = a_1 IKK_i + a_2 IPK_i + a_3 IIK_i \quad (3)$$

Penjelasannya: **BK_i** adalah Bobot kecamatan *i*, **IKK_i** adalah Indeks kebutuhan kecamatan *i*, **IPK_i** adalah Indeks potensi kecamatan *i*, **IIK_i** adalah Indeks insentif kecamatan *i*, **a₁...3** adalah Bobot masing-masing indeks dalam perhitungan BK_i, dan $a_1 + a_2 + a_3 = 1$.

Dalam persamaan (3) tampak bahwa bobot kecamatan mencerminkan prioritas yang menjadi preferensi suatu pemerintahan daerah terhadap kebijakan perimbangan keuangan kabupaten-kecamatan. Prioritas ini bisa dilihat dari bobot indeks (a) yang ditetapkan, apakah yang diprioritaskan adalah kebutuhan kecamatan, potensi kecamatan atau insentif kecamatannya. Sementara itu, masing-masing indeks bobot di kecamatan dapat dihitung dengan persamaan:

(1) Variabel Indeks Kebutuhan Kecamatan (IKK) ada 3 (tiga) indikator yang menentukan, yaitu penduduk miskin, pelayanan fasilitas publik, dan kondisi jalan rusak

$$IKK_i = b_1 IPM_i - b_2 IFLP_i + b_3 IJRK_i \quad (4)$$

Penjelasannya: **IKK_i** adalah Indeks kebutuhan kecamatan *i*, **IPM_i** adalah Indeks penduduk miskin kecamatan *i* (jumlah penduduk miskin

kecamatan *i*/total penduduk miskin seluruh kecamatan); **IFLP_i** adalah Indeks fasilitas layanan publik kecamatan *i* (jumlah skor fasilitas layanan publik kecamatan *i*/total skor fasilitas layanan publik seluruh kecamatan) **IJRK_i** adalah Indeks jalan rusak kecamatan *i* (panjang jalan rusak kecamatan *i*/total panjang jalan rusak seluruh kecamatan), **b** adalah Bobot masing-masing kecamatan dalam penentuan IKK_i

(2) Variabel Indeks potensi kecamatan i adalah skor potensi kecamatan *i*/total skor potensi kecamatan dari seluruh kecamatan. Ada 3 (tiga) indikator yang akan digunakan untuk menghitung variabel indeks potensi kecamatan adalah: lembaga pendidikan, prasarana kesehatan, dan lembaga ekonomi

$$IPK_i = b_1 ILP_i + b_2 IPK_i + b_3 IJRK_i \quad (5)$$

Penjelasannya: **IPK_i** adalah Indeks potensi kecamatan *i*, **ILP_i** adalah Indeks lembaga pendidikan kecamatan *i* (jumlah skor lembaga pendidikan kecamatan *i*/jumlah total skor prasarana pendidikan seluruh kecamatan), **IPK_i** adalah Indeks prasarana kesehatan kecamatan *i* (jumlah skor prasarana kesehatan kecamatan *i*/jumlah total skor prasarana kesehatan seluruh kecamatan), **ILE_i** adalah Indeks lembaga ekonomi kecamatan *i* (jumlah skor lembaga ekonomi kecamatan *i*/jumlah total skor lembaga ekonomi seluruh kecamatan), **b** adalah bobot masing-masing indeks dalam penentuan variabel IPK_i

(3) Variabel Indeks insentif potensi i adalah skor insentif kecamatan *i*/total skor insentif seluruh kecamatan. Perhitungan skor insentif dihitung melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PBB kecamatan dengan rencana penerimaan PBB yang ditargetkan kecamatan tersebut. Indikator perhitungan insentif seperti itu juga bias kepentingan supra desa. Sehingga memilih skor insentif kecamatan didapatkan melalui perhitungan hasil pemanfaatan aset kecamatan yang dimiliki, misalnya tanah kas desa dibangun untuk kios desa dan disewakan ke warga desa, hasil sewa kios desa inilah dasar perhitungan insentif desa yang melebar dalam kecamatan. Indikator yang digunakan dalam perhitungan variabel intensif kecamatan adalah: penerimaan pajak, dan lelang aset kecamatan.

$$IiKi = c1 ILAKi + c2 IPPi \quad (6)$$

Penjelasannya: **IiKi** adalah Indeks insentif kecamatan *i*, **ILAKi** adalah Indeks lelang aset kecamatan *i* (jumlah nilai lelang aset kecamatan *i*/jumlah nilai lelang aset seluruh kecamatan), **IPPi** adalah Indeks penerimaan pajak kecamatan *i* (jumlah penerimaan pajak kecamatan *i*/jumlah penerimaan pajak seluruh kecamatan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kependudukan Kecamatan Salem

Kepadatan Penduduk. Konsentrasi penduduk tahun 2007 pada kecamatan Salem secara total sebesar 370 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada desa Pabuaran, dengan luasan desa 2,58 km² dan jumlah penduduk 2909 jiwa didapat kepadatan penduduk 1128 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat pada desa Windusakti, hanya 50 jiwa/km². Selengkapnya angka kepadatan penduduk kecamatan Salem kabupaten Brebes yang dirinci per desa dapat dilihat *Tabel 4* dalam *lampiran*.

Struktur Penduduk. (1) *Jenis Kelamin.* Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan tabel penduduk berdasarkan jenis kelamin di bawah, maka sex ratio kecamatan Salem tahun 2007 sebesar $(28518/27823 \times 100) = 102,50$ artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di kecamatan Salem, akan terdapat pula sebanyak 100 pria di dalamnya (lihat *Tabel 5* dalam *lampiran*)

(2) *Tingkat Pendidikan.* Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dikenyam, menunjukkan nilai/kualitas sumberdaya manusia kecamatan Salem di masa mendatang. Jumlah penduduk kecamatan Salem berdasarkan tingkat pendidikannya secara rinci disajikan pada *Tabel 6* dalam *lampiran*.

(3) *Mata Pencaharian.* Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Penduduk menurut

mata pencaharian di kecamatan Salem dari yang terbesar ke terkecil yaitu; petani/peternak, pedagang, buruh bangunan, jasa-jasa, buruh industri, PNS/ABRI, nelayan, pengangkutan, pengusaha dan pensiunan.

Penduduk kecamatan Salem sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani/peternak yaitu sebanyak 17553. Penduduk, sebagai buruh tani sebanyak 7723 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada *Tabel 7* dalam *lampiran*.

Kondisi Perekonomian Kecamatan Salem

Kondisi Perindustrian. Kondisi perindustrian di kecamatan Salem dapat dikelompokkan menjadi industri kecil formal dan non formal. Industri kecil formal terdiri dari industri kecil formal cabang industri agro dan industri formal cabang industri tekstil. Sedangkan industri kecil non formal terdiri dari industri kecil non formal cabang industri agro, tekstil, dan logam, elektronik dan kimia aneka. Di kecamatan Salem terdapat 11 industri kecil dan industri rumah tangga. Industri kecil terdapat di beberapa desa yaitu di desa Kedungmanis, Bentarsari, Bantar, dan Wanoja. Sedangkan industri rumah tangga tersebar di seluruh desa. Selengkapnya lihat *Tabel 8* dalam *lampiran*.

Industri yang ada di kecamatan Salem antara lain industri makanan (sale pisang), industri pakaian jadi, pembuatan minyak nilam, industri batik tulis, dan sabun cuci.

Berdasarkan gambaran umum di atas dapat dikaji secara awal potensi dan permasalahan yang terdapat di kecamatan Salem antara lain:

(1) **Potensi.** Berdasarkan letak geografis kecamatan Salem, posisi geografis kecamatan ini merupakan potensi strategis yang mampu mendukung perkembangan kabupaten Brebes mengingat salah satu fungsi dan peran kecamatan Salem sebagai dan pusat Kota Salem pada SSWP III.2.

Potensi sektor kependudukan yang dapat dilihat di Kecamatan Salem antara lain:

(a) Jumlah penduduk di Kecamatan Salem yang perkembangannya selalu mengalami peningkatan merupakan gambaran adanya potensi ketersediaan sumberdaya manusia di Kecamatan Salem; (b) Kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh Kecamatan Salem me-

nunjukkan bahwa Kecamatan Salem masih memiliki potensi sebagai kawasan pengembangan perkotaan; (c) Adanya potensi sumberdaya manusia yang didukung dengan tingkat pendidikan. Hal itu dilihat dari adanya jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai tahap Diploma atau Perguruan Tinggi, meskipun masih terdapat jumlah penduduk yang belum tamat SD; (d) Adanya potensi sumberdaya manusia sebagai potensi tenaga kerja. Hal itu digambarkan dari adanya dominasi penduduk berdasarkan umur merupakan usia produktif. (e) Berdasarkan mata pencaharian penduduk menggambarkan adanya potensi sumberdaya manusia yang mendukung bidang pertanian, mengingat jenis mata pencaharian paling banyak adalah sebagai petani/peternak.

Adanya potensi pengembangan Kecamatan Salem dengan pengembangan penggunaan lahan non pertanian. Hal itu ditunjukkan dengan adanya luas lahan bukan sawah memiliki jumlah yang lebih besar dari pada lahan sawah yaitu sebesar 12.650 Ha (83 persen).

Potensi sarana dan prasarana di kecamatan Salem:

(a) Adanya potensi ketersediaan sarana pendidikan dari jenjang pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA,

(b) Adanya potensi ketersediaan sarana peribadatan sebagai sarana untuk ibadah penduduk di Kecamatan Salem.

(c) Adanya potensi ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Sirampog yang terdiri atas Puskesmas/PUSTU, Dokter Praktek, Bidan Praktek dan Dukun Bayi.

(e) Adanya potensi ketersediaan sarana perekonomian yang berperan besar dalam pelayanan ekonomi di Kecamatan Salem di antaranya yaitu: pasar umum/hewan/ikan, toko/warung, bank, badan perkreditan, koperasi, KUD, BUUD, warung makan, dan rumah makan.

(f) Adanya potensi ketersediaan sarana perumahan dengan kondisi yang cukup baik. Hal itu dapat digambarkan dari kondisi sarana perumahan di Kecamatan Salem secara dominan memiliki rumah dengan jenis rumah tembok dan rumah sebagian tembok.

Adanya potensi pelayanan telekomunikasi yang bisa untuk dikembangkan mengingat su-

dah adanya jaringan telekomunikasi yang masuk di kecamatan Salem.

Potensi Perekonomian. Jika dilihat dari data dan kebijakan dalam RTRW Kabupaten Brebes maka:

(a) Adanya potensi perekonomian dari sektor pertanian tanaman pangan, yang menjadi sentra ubi jalar dan ubi kayu, sentra kelapa dan kelapa hibrida, sentra kakao, sentra jambu mete, sentra tanaman nilam; (b) Adanya potensi sektor peternakan dengan sentra ternak sapi, sentra ternak kerbau; (c) Potensi perikanan berupa pusat pengembangan perikanan kolam.

(d) Adanya potensi industri dengan jenis industri kecil dan rumah tangga yang juga ikut memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Sentra industri yang ada berupa sentra industri batik tulis di Bentrasari.

Adanya potensi sumberdaya alam berupa air, yang digambarkan dari adanya sumber air yang terdapat di kecamatan Salem.

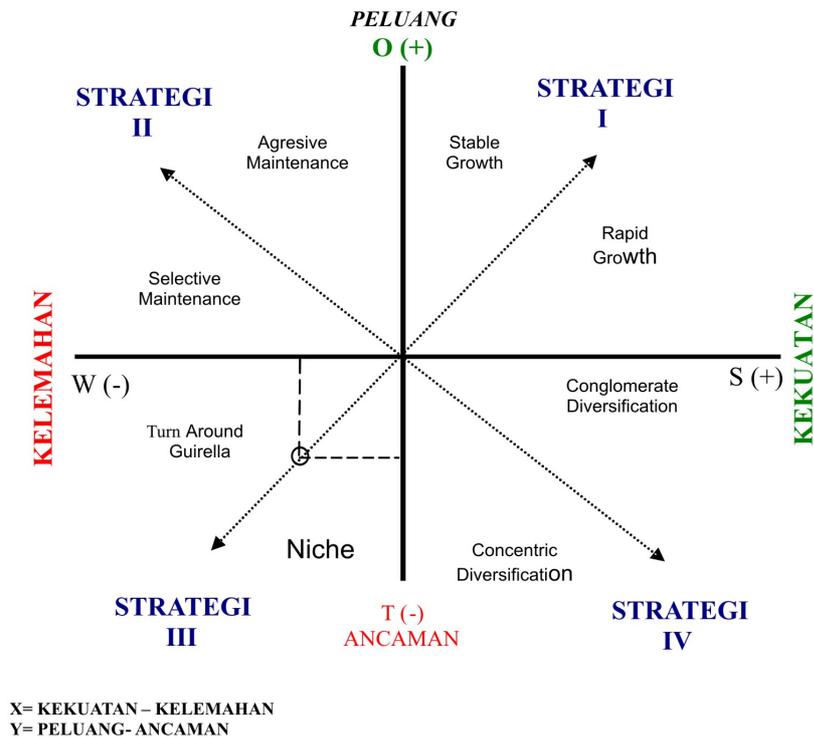
Adanya potensi kawasan strategis kecamatan yaitu kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup yaitu kecamatan Salem sebagai pengembangan kawasan konservasi alam.

SWOT Kecamatan Salem

Posisi strategis Kecamatan Salem berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan. Secara rinci hasil SWOT yang menggambarkan posisi strategis pengembangan kecamatan Salem dapat dilihat pada *Tabel 9* dalam *lampiran*.

Hasil analisis SWOT pada *Tabel 9* menunjukkan bahwa: (1) variabel internal mempunyai kekuatan yang lebih kecil dari pada kelemahan dengan skor akhir -0,55. (2) Variabel eksternal memiliki nilai ancaman lebih besar dibandingkan nilai peluang, sehingga memperoleh nilai - 1,1. Hasil tersebut menempatkan kecamatan Salem berada pada posisi strategis III, hasil analisis Delphi dapat disajikan pada *Gambar 1*.

Gambar 1 menunjukkan bahwa posisi Kecamatan Salem Kabupaten Brebes berada pada Posisi Strategis III. Kondisi ini menggambarkan perkembangan Kecamatan Salem perlu didukung dari adanya pengembangan variabel internal dan eksternal. Pengembangan kedua variabel tersebut perlu dilakukan dengan inte-



Gambar 1. Posisi Strategis Kecamatan Salem

grasi dan saling melengkapi. Hal itu perlu dilakukan mengingat posisi pengembangan Kecamatan Salem masih sangat minim. Strategi pengembangan yang terintegrasi tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk membawa perkembangan Kecamatan Salem kearah yang lebih berkembang dari kondisi sekarang ini.

Berdasarkan posisi strategis yang dimiliki Kecamatan Salem, maka dalam pengembangannya dapat dirumuskan beberapa strategi antara lain: (1) pemantapan pengembangan kecamatan salem sesuai dengan arahan utama untuk pertanian tanaman pangan lahan kering, perdagangan, perhubungan dengan Salem, industri kecil dan sebagai pengembangan kawasan konservasi alam; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan HDI (*Human Development Indeks/IPM*); (3) Pengoptimalan pertanian untuk mendukung potensi ekonomi khususnya sektor pertanian di Kecamatan Salem; (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kecamatan Salem, lihat *Tabel 11* dan *Tabel 12* dalam *lampiran*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka Kecamatan Salem menduduki posisi strategis ketiga dapat dirumuskan skenario pengembangan pembangunan kecamatan di Kabupaten Brebes, lihat *Gambar 2* dalam *lampiran*.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil analisis pada pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Salem menduduki posisi strategis ketiga artinya pengembangan kecamatan perlu memperhatikan kedua faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal yang saling terintegrasi.

Program-program yang akan dikembangkan meliputi aspek: sumber daya manusia, penggunaan lahan, perekonomian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase, jaringan air bersih, dan jaringan jalan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi dae-

rah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa suatu daerah yang tidak mampu membiayai sumber pelaksanaan otonomi daerah akan di-merger (digabungkan) atau dihapuskan. Berdasarkan kebutuhan dan tuntutan zaman maka perlu adanya perluasan wilayah dalam rangka menambah sumber penerimaan daerah, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes adalah studi potensi Kecamatan Salem.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rule Fiscal Decentralisation*, Atlanta: International Studies Program School of Policy Studies, Georgia State University.
- Balai Penerbitan Panca Usaha. 2001. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: CV. Laksana Mandiri.
- Caroline. 2004. Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga. Semarang: UNDIP (tesis yang tidak dipublikasikan)
- Darumurti, Krisna D., dan Umbu Raunta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan, Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kennet Davey dan Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Djamin, Zulkarnain. 1992. *Perencanaan dan Analisa Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fisher, Ronald. 1996. *State and Local Public Finance*. New York: A Time Higher Education Group, Inc. Company.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Hidayat, Syarif. 2000. *Reflektifitas Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Jatmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf Publising.
- Jones, Bernard. 1995. *Local Government Financial Management*. London: ICSA Publishing Limited.
- Kadariyah. 1992. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kaho, Josep Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamaludin, Rustian. 1992. *Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: FE-UI.
- Kristiadi, J.B. 1985. Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah. *Prisma* No. 12, Tahun XIV. Jakarta: LP3ES.
- Kuncoro, Mudrajat. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Prisma*, No. 4 Tahun. XXIV.
- Lians, Alfian. 1985. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru. *Prisma* No. 4 Tahun XIV.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2001. Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah. *Kajian Ekonomi dan Bisnis Stiekers*, Vo. 5, No. 29, Tahun 2001.
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2001.
- Mardiasmo. 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Permasalahan dan Kebijakan*, makalah yang disampaikan dalam Sidang Ple-

- no Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ke-10 di Batam
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: FE-UUI.
- Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuko Wonosraten Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Kerjasama IRIS dan LPEM UI.
- Musgrave. 1990. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek (Edisi 5)*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mustari, Andi. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 1980. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Pamudji, S. 1990. *Makna Dati II Sebagai Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: CSIS.
- Pontjowinoto, Didit, MP. 1991, Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. *Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Riyadi, Agung, Anton A, Didit P. 2002. *Laporan Penelitian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: BPPE FE UMS.
- Santosa, Bagus. 1995. *Evaluasi Peran Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah : Studi Kasus Kabupaten Sleman (laporan penelitian yang tidak dipublikasikan)*, Yogyakarta: UGM.
- Shaw, G.K. 1989. *Hubungan Fiskal Antara Pemerintah*, Penerjemah Silvia Rilwon. Jakarta: Gramedia.
- Soejamto. 1992. *Otonomi Birokrasi Partisipasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soelarso. 1998, *Modul Mata Pelajaran Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan*. Yogyakarta: UGM.
- Soesilo. 2001. Perspektif Politik Ekonomi Otonomi Daerah di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, *Ekuitas*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2001.
- Soetrisno. 1981. *Evaluasi Project Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Soetrisno. PH. 1986. *Ekonomi Publik II*. Jakarta: Karunika.
- Solihin, Dadang. 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Sukirno, Sadono. 1982. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmoko. 1996. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supriady, Deddy. 2001. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Suprihanto, John. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supriyatna, Tjahya. 1992. *Sistim Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susantun, Indah. 2000. Fungsi Keuntungan Cobb Douglas Dalam Pendugaan Efisiensi Ekonomi Relatif, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, Edisi 2000.
- Susijati, B Hirawan. 1986. Analisis tentang Keuangan Daerah di Indonesia, *EKI* Vo. XXXIV No. 1.
- Syamsi, Ibnu. 1993. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bima Aksara.
- Umar, Husein. 2003. *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT. SUN.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Usman, B. 1977. *Pajak-pajak Indonesia*, Jakarta: Majalah Mingguan Pajak.
- Wantara, Agus. 1995. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1970-1980* (tesis yang tidak dipublikasikan), Yogyakarta: UGM.
- Waluya, Harry. 2001. Analisis Rasio PAD/APBD terhadap Kebijakan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis FE Universitas Katolik Indonesia Atmajaya*, Vol. 1, No. 2, Edisi Agustus 2001.
- Yulianti, Asnafiah. 2001. Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah, *Kajian Ekonomi dan Bisnis STIEKERS*, Vo. 5 , No. 29, Tahun 2001.

LAMPIRAN

Tabel 4. Kepadatan Penduduk Kecamatan Salem

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan Jiwa/Km ²)
1	Gunung Jaya	906	5,66	160
2	Indrajaya	3.134	10,02	313
3	Banjaran	6.610	7,79	849
4	Salem	7.237	10,75	673
5	Gunung Larang	1.918	5,13	374
6	Gunung Sugih	1.768	3,71	477
7	Ganggawang	1.804	4,96	364
8	Citimbang	1.670	7,6	220
9	Kadumanis	839	7,36	114
10	Gandoang	814	6,04	135
11	Ciputih	3.278	9,28	353
12	Bentarsari	6.238	5,62	1.110
13	Bantar	3.947	5,82	678
14	Pabuaran	2.909	2,58	1.128
15	Tembongraja	4.119	12,63	326
16	Gunung Tajem	973	9,57	102
17	Windusakti	426	8,47	50
18	Winduasri	391	4,41	89
19	Capar	744	8,47	88
20	Wanoja	3.307	9,99	331
21	Pasir Panjang	3.309	6,23	531
	Jumlah	56.341	152,09	8.465

Sumber: Kecamatan Salem dalam Angka 2008

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Salem

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunung Jaya	484	422	906
2	Indrajaya	1.605	1.529	3.134
3	Banjaran	3.254	3.356	6.610
4	Salem	3.670	3.567	7.237
5	Gunung Larang	989	929	1.918
6	Gunung Sugih	924	844	1.768
7	Ganggawang	897	907	1.804
8	Citimbang	864	806	1.670
9	Kadumanis	426	413	839
10	Gandoang	414	400	814
11	Ciputih	1.643	1.635	3.278
12	Bentarsari	3.106	3.132	6.238
13	Bantar	1.973	1.974	3.947
14	Pabuaran	1.479	1.430	2.909
15	Tembongraja	2.124	1.995	4.119
16	Gunung Tajem	479	494	973
17	Windusakti	251	175	426
18	Winduasri	202	189	391
19	Capar	373	371	744
20	Wanoja	1.690	1.617	3.307
21	Pasir Panjang	1.671	1.638	3.309
	Jumlah	28.518	27.823	56.341

Sumber: Kecamatan Salem dalam Angka 2008

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Salem Tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Tidak/Belum Tamat SD/ Tidak Punya Ijazah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SLTA	Tamat Diploma/ Universitas	Jumlah
1	Gunung Jaya	313	350	65	40	9	777
2	Indrajaya	716	1.053	460	325	17	2.571
3	Banjaran	2.744	2.120	380	181	44	5.469
4	Salem	869	1.603	1.701	1.602	81	5.856
5	Gunung Larang	259	1.121	83	48	1	1.512
6	Gunung Sugih	403	766	93	70	5	1.337
7	Ganggawang	253	121	503	282	211	1.370
8	Citimbang	661	577	68	14	10	1.330
9	Kadumanis	241	367	66	20	2	696
10	Gandoang	170	458	52	12	1	693
11	Ciputih	846	1.587	130	87	42	2.692
12	Bentarsari	1.102	2.962	706	148	4	4.922
13	Bantar	619	1.777	456	202	62	3.116
14	Pabuaran	376	1.295	449	175	50	2.345
15	Tembongraja	515	2.383	236	86	19	3.239
16	Gunung Tajem	179	519	28	21	0	747
17	Windusakti	105	186	28	15	1	335
18	Winduasri	144	135	25	5	0	309
19	Capar	90	415	60	30	2	597
20	Wanoja	643	1.568	260	153	57	2.681
21	Pasir Panjang	220	1.500	400	503	68	2.691
	Jumlah	11.468	22.863	6.249	4.019	686	45.285

Sumber: Kecamatan Salem dalam Angka 2008

Tabel 7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Salem

No.	Desa/Kelurahan	Petani/ Peternak	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Supir/ Kernet	PNS/TNI/ Polisi	Pensiunan	Lain-lain	Jumlah
1	Gunung Jaya	305	5	0	2	0	25	40	0	10	0	0	387
2	Indrajaya	1.436	890	0	10	4	12	12	10	85	10	5	2.474
3	Banjaran	1.540	908	0	12	0	405	131	22	75	23	175	3.291
4	Salem	2790	1.125	0	377	15	282	280	170	268	80	341	5.728
5	Gunung Larang	591	48	0	4	0	20	32	0	10	1	0	706
6	Gunung Sugih	208	100	0	3	30	45	20	18	15	0	132	571
7	Ganggawang	878	425	0	1	81	101	35	3	14	7	27	1.572
8	Citimbang	477	300	0	0	0	50	0	0	4	1	0	832
9	Kadumanis	562	8	0	16	0	0	6	0	2	0	1	595
10	Gandoang	382	0	0	0	56	20	4	1	1	4	6	474
11	Ciputih	1.010	525	0	1	0	0	35	10	15	1	34	1.631
12	Bentarsari	1.509	706	0	23	15	67	32	28	85	22	5	2.492
13	Bantar	974	573	0	5	0	20	204	35	34	3	91	1.939
14	Pabuaran	526	457	0	390	0	105	10	0	37	1	0	1.526
15	Tembongraja	2.185	75	0	0	25	50	35	0	60	46	6	2.482
16	Gunung Tajem	342	208	0	3	0	23	12	2	1	1	39	631
17	Windusakti	80	65	0	1	0	0	8	0	3	2	0	159
18	Winduasri	207	30	0	0	0	12	6	15	0	1	0	271
19	Capar	150	505	0	0	0	9	40	0	2	0	0	706
20	Wanoja	753	600	0	10	20	300	40	3	34	6	150	1.916
21	Pasir Panjang	648	170	0	11	45	35	52	8	43	0	31	1.043
	Jumlah	17.553	7.723	0	869	291	1.581	1.034	325	798	209	1.043	31.426

Sumber: Kecamatan Salem dalam Angka 2008

Tabel 8. Kondisi Perindustrian di Kecamatan Salem Tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Industri Kecil	Industri RT	Jumlah
1	Gunung Jaya	0	4	4
2	Indrajaya	0	16	16
3	Banjaran	0	260	260
4	Salem	0	32	32
5	Gunung Larang	0	22	22
6	Gunung Sugih	0	4	4
7	Ganggawang	0	249	249
8	Citimbang	0	6	6
9	Kadumanis	1	20	21
10	Gandoang	0	200	200
11	Ciputih	0	170	170
12	Bentarsari	3	301	304
13	Bantar	6	364	370
14	Pabuaran	0	285	285
15	Tembongraja	0	30	30
16	Gunung Tajem	0	233	233
17	Windusakti	0	40	40
18	Winduasri	0	41	41
19	Capar	0	25	25
20	Wanoja	1	22	23
21	Pasir Panjang	0	76	76
	Jumlah	11	2.400	2.411

Sumber: Kecamatan Salem Dalam Angka 2008

Tabel 9. Hasil Analisis SWOT untuk Lingkungan Internal Kecamatan Salem

No	Lingkungan Internal	Bobot	K-L	Tertimbang	
				Kekuatan	Kelemahan
1	Sumberdaya Manusia (SDM)	10	-0,05	0,075	0,125
2	Penggunaan Lahan	10	0,06	0,12	0,06
3	Perekonomian	10	0	0,12	0,12
4	Sarana Pendidikan	10	-0,2	0	0,2
5	Sarana Kesehatan	10	-0,16	0	0,16
6	Jaringan Listrik	10	0,3	0,3	0
7	Jaringan Telepon	10	-0,1	0	0,1
8	Jaringan Drainase	10	-0,1	0	0,1
9	Jaringan Air Bersih	10	-0,1	0	0,1
10	Jaringan Jalan	10	-0,2	0	0,2
Jumlah		100	-0,55	0,615	1,165

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2009

Tabel 10. Hasil Analisis SWOT untuk Lingkungan Eksternal

No	Lingkungan Eksternal	Bobot	P-A	Tertimbang	
				Peluang	Ancaman
1	Keterkaitan Struktur Ruang	35	-0,7	0	0,7
2	Sistem Transportasi	35	-0,7	0	0,7
3	Kebijakan Yang Terkait	30	0,3	0,45	0,15
Jumlah		100	-1,1	0,45	1,55

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2009

Tabel 11. Strategi Kecamatan Salem

VARIABEL INTERNAL VARIABEL EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) Variabel Kekuatan Internal	KELEMAHAN (WEAKNESS) Variabel Kelemahan Internal
	Strategi SO (Kekuatan - Peluang)	Strategi WO (Kelemahan - Peluang)
PELUANG (OPPORTUNITY) Variabel Peluang Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya Manusia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kualitas SDM untuk menarik minat investor melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan) ▪ Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian ketrampilan pengelolaan pertanian dan industri untuk mendukung keberadaan potensi yang ada 2. Penggunaan Lahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kebijakan tata ruang untuk mengatur perkembangan penggunaan lahan sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan lahan produktif di Kecamatan Salem. ▪ Peningkatan produktivitas lahan dengan dukungan pengembangan infrastruktur, misalnya jaringan jalan (aksesibilitas) ▪ Peningkatan kegiatan dalam mengembangkan dan mempertahankan lahan produktif yang diiringi dengan kekuatan aturan hukum. 3. Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan skala pelayanan sarana perekonomian untuk mendukung aliran (distribusi) barang hasil pertanian, industri, dan sebagainya seperti aksesibilitas pasar, koperasi, dan lain-lain ▪ Peningkatan produksi sektor pertanian, peningkatan potensi sektor ekonomi pada industri kecil dan rumah tangga untuk menarik minat investor melalui pengembangan sarana perekonomian 4. Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana pendidikan melalui peningkatan kualitas maupun kuantitasnya untuk pemerataan pelayanan pendidikan sesuai struktur ruang ▪ Peningkatan jenjang (strata) pendidikan yang diiringi dengan dukungan tenaga pendidik yang handal untuk mengoptimalkan potensi SDM 5. Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Salem ▪ Peningkatan tenaga medis yang handal untuk mengoptimalkan kualitas kesehatan masyarakat 6. Jaringan Listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya Manusia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Indeks Pembangunan Manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. ▪ Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan untuk menangkap peluang investor yang cukup besar. 2. Penggunaan Lahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoptimalan kinerja dan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengembangan penggunaan lahan. ▪ Penetapan dan penegakan penegakan hukum dalam pengaturan penggunaan lahan 3. Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian, ▪ Penambahan sarana ekonomi baru seperti bank, koperasi dan sebagainya untuk kemudahan modal usaha 4. Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pendidikan, baik itu tenaga pendidik maupun metode pendidikan yang digunakan ▪ Penambahan sekolah-sekolah kejuruan dengan lulusan yang siap kerja 5. Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sarana kesehatan untuk pemerataan pelayanan ▪ Penambahan tenaga kesehatan yang handal 6. Jaringan Listrik <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jaringan listrik untuk pemerataan pelayanan ▪ Peningkatan daya untuk mendukung perkembangan industri pengolahan 7. Jaringan Telepon <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan telepon untuk mempercepat penyampaian informasi bagi masyarakat ▪ Penambahan jaringan telepon untuk mendukung kegiatan ekonomi 8. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kondisi dan kualitas jaringan drainase menjadi sistem drainase permanen ▪ Penetapan aturan-aturan yang tegas

VARIABEL INTERNAL VARIABEL EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) Variabel Kekuatan Internal	KELEMAHAN (WEAKNESS) Variabel Kelemahan Internal
ANCAMAN (THREATS) Variabel Hambatan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan daya listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik domestik (industri) maupun domestik di Kecamatan Salem ▪ Peningkatan jaringan listrik untuk pemerataan pelayanan <p>7. Jaringan Telepon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sambungan/jaringan baru untuk mendukung kelancaran komunikasi dan telematika di Kecamatan Salem ▪ Peningkatan jaringan nirkabel untuk pemerataan/pemenuhan pelayanan secara merata <p>8. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kondisi dan kualitas jaringan drainase menjadi sistem drainase permanen ▪ Peningkatan manajemen pengelolaan jaringan drainase (individu/komunal) <p>9. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengelolaan sumber mata air sebagai bahan baku pemenuhan air bersih ▪ Peningkatan jaringan dari segi kualitas (perpipaan/non perpipaan) dan kuantitas (jumlah pipa) <p>10. Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas jalan untuk memperlancar gerak distribusi barang hasil pertanian ke daerah sekitar ▪ Pengembangan moda transportasi untuk mempermudah masyarakat mencapai wilayah kecamatan 	<p>terkait dengan penggunaan jaringan drainase (terpisah dengan sanitasi)</p> <p>9. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana pengolahan air bersih, seperti pembuatan Instalasi pengolahan air, sumur bor, dsb ▪ Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuat sumur resapan guna menjaga kelangsungan air tanah <p>10. Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas jalan untuk menggali potensi yang ada secara optimal, misalnya dengan meningkatkan kelas jalan pada lokasi-lokasi strategis
	<p>Strategi ST (Kekuatan - Ancaman)</p> <p>1. Sumberdaya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM untuk pengoptimalan pemanfaatan SDA ▪ Pengoptimalan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang didukung dengan SDM kualitas <p>2. Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktivitas lahan dengan meminimalisasi adanya konversi lahan ▪ Penetapan kebijakan alih fungsi lahan sebagai upaya mempertahankan ketersediaan lahan produktif <p>3. Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan manajemen pengelolaan SDA untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan ▪ Penetapan peraturan dalam pemanfaatan SDA untuk mendukung potensi sektor ekonomi misalnya peraturan terkait pemanfaatan SDA <p>4. Sarana Pendidikan</p>	<p>Strategi WT (Kelemahan - Ancaman)</p> <p>1. Sumberdaya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan program keluarga berencana secara terpadu untuk mencegah terjadinya peledakan penduduk ▪ Peningkatan kualitas hidup masyarakat (peningkatan gizi, pola hidup sehat, dsb) <p>2. Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan area lahan pertanian abadi untuk mempertahankan keberadaan sawah ▪ Penetapan insentif dan disinsentif sebagai sarana proteksi terkait kegiatan konversi lahan yang tidak terkendali <p>3. Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung usaha masyarakat ▪ Meningkatkan sosialisasi kepada

VARIABEL INTERNAL VARIABEL EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) Variabel Kekuatan Internal	KELEMAHAN (WEAKNESS) Variabel Kelemahan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan teknologi untuk menciptakan kreativitas masyarakat guna terciptanya lapangan pekerjaan baru ▪ Peningkatan kurikulum sekolah kejuruan untuk mendukung pengelolaan SDA misalnya politeknik <p>5. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang masih rendah, misalnya gizi buruk, ▪ Peningkatan pemerataan jumlah dan persebaran kesehatan yang didukung oleh tenaga medis yang cukup <p>6. Jaringan Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan jaringan baru untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat ▪ Penambahan lampu-lampu penerangan di tempat-tempat tertentu guna mendukung kegiatan masyarakat <p>7. Jaringan Telepon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan jaringan baru untuk mencegah terjadinya isolasi wilayah ▪ Peningkatan jaringan telepon (internet) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan <p>8. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sistem jaringan drainase untuk mencegah terjadinya kondisi lingkungan yang buruk dan tidak sehat ▪ Pengembangan sistem drainase yang bisa bermanfaat bagi bidang pertanian <p>9. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sumur resapan untuk mempertahankan keberadaan air tanah ▪ Peningkatan jaringan perpipaan sebagai upaya perluasan jangkauan pelayanan <p>10. Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan trayek angkutan untuk memobilisasi ruang gerak masyarakat secara cepat ▪ Peningkatan jaringan jalan untuk mendukung terciptanya pemanfaatan SDA secara optimal 	<p>masyarakat untuk berwiraswata</p> <p>4. Sarana Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ▪ Mengembangkan kursus-kursus ketampilan dan lembaga pendidikan informal lainnya untuk mengasah potensi masyarakat <p>5. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya hidup sehat ▪ Pengembangan lembaga kesehatan di tiap desa, minimal di setiap desa ada bidan/ mantri <p>6. Jaringan Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan baru untuk pemerataan pelayanan ▪ Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk hemat listrik (tepat guna) <p>7. Jaringan Telepon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jaringan baru untuk pemerataan pelayanan ▪ Peningkatan jaringan nirkabel untuk pemerataan/ pemenuhan pelayanan secara merata <p>8. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kondisi dan kualitas jaringan drainase menjadi sistem drainase permanen ▪ Peningkatan manajemen pengelolaan jaringan drainase (individu/komunal) <p>9. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan instalasi pengelolaan sumber mata air sebagai bahan baku pemenuhan air bersih ▪ Peningkatan jaringan dari segi kualitas (perpipaan/ non perpipaan) dan kuantitas(jumlah pipa) <p>10. Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran serta masyarakat secara swadaya dalam pengembangan jaringan jalan ▪ Peningkatan kualitas jalan untuk memperlancar gerak barang dan manusia

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2009

Tabel 12. Skenario dan Program Kecamatan Salem

No.	Strategi	Kegiatan	Sumber pendanaan	SKPD	Keterangan
I Sumberdaya Manusia					
1	Mengembangkan kualitas SDM untuk menarik minat investor melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan)	Pengadaan seminar mengenai pembentukan kualitas manusia yang memenuhi standar IPM Bimbingan teknis secara berkala bagi tenaga ahli pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi *)	APBD. APBN. BLN	Dinas Pendidikan	SDM
2	Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian ketrampilan pengelolaan industri untuk mendukung keberadaan potensi industri	Penyediaan dan pembangunan balai pengembangan keterampilan pengolahan industri.	APBD	Dinas Perindustrian dan perdagangan	SDM
3	Peningkatan kualitas SDM untuk pengoptimalan pemanfaatan SDA	Pengembangan promosi dan pemasaran dengan pameran produk industri yang diproduksi.	APBD	Dinas Perindustrian dan perdagangan	SDM
		Penambahan pembekalan/ diklat mengenai pengoptimalan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan pada tenaga kerja yang terkait.	APBD	Dinas Sosial. Tenaga Kerja & Transmigrasi	SDM
		Peningkatan teknologi baru yang bisa digunakan dalam pengoptimalan pemanfaatan SDA	APBD	Dishubkominfo	SDM
4	Peningkatan pengetahuan masyarakat akan teknologi/informasi	Sosialisasi jaringan internet kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat akan jaringan internet.	APBD	Dishubkominfo	SDM
5	Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan untuk menangkap peluang investor yang cukup besar.	Pembinaan mengenai kode etik dan profesionalisme tenaga ahli yang berstandar internasional	APBD	Dinas Pendidikan	SDM
6	Mengembangkan program Keluarga Berencana secara terpadu untuk mencegah terjadinya peledakan penduduk.	Sosialisasi pentingnya keikutsertaan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana *)	APBD	Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan	Kesehatan
7	Peningkatan kualitas hidup masyarakat (peningkatan gizi, pola hidup sehat, dsb)	Penyuluhan untuk menciptakan lingkungan sehat *)	APBD	Dinas Kesehatan	Kesehatan
8	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk berwiraswata	Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait bidang kewirausahaan *)	APBD	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ekonomi
		Pembinaan kepada masyarakat tentang sistem dan cara-cara yang tepat dalam berwirausaha*)	APBD	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ekonomi

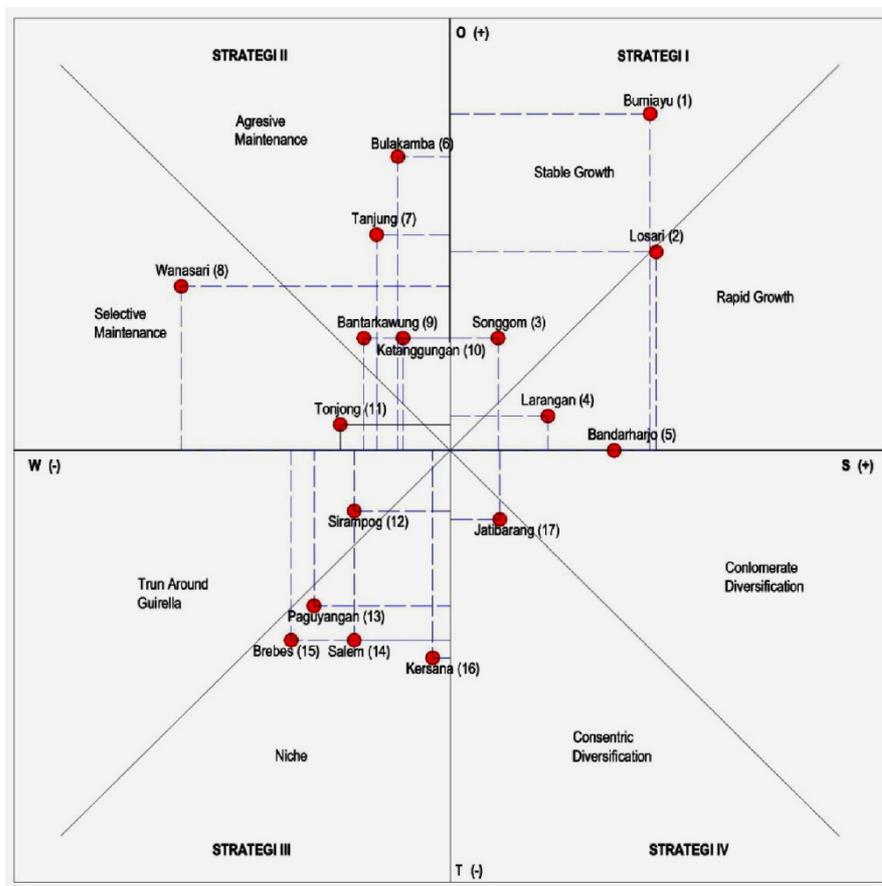
No.	Strategi	Kegiatan	Sumber pendanaan	SKPD	Keterangan
II Penggunaan Lahan					
1	Penetapan kebijakan tata ruang untuk mengatur perkembangan penggunaan lahan sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan lahan produktif di Kecamatan Salem	Penyusunan rencana melalui studi tata ruang dalam pemanfaatan lahan di Kecamatan Salem*)	APBD	Bappeda	Ekonomi
2	Peningkatan produktivitas lahan dengan meminimalisasi adanya konversi lahan	Penetapan pedoman terkait kegiatan konversi lahan	APBD	Bappeda	Ekonomi
3	Tercapainya pengadaan tanah untuk TPA Sampah	Pengadaan tanah tempat pembuangan akhir sampah *)	APBD	DPU dan Tata Ruang	Kesehatan
4	Peningkatan keamanan kecamatan terhadap masalah bencana alam	Penyediaan daerah/kawasan evakuasi bencana	APBD	Bappeda	SDM
III Perekonomian					
1	Peningkatan skala pelayanan sarana prasarana untuk mendukung aliran (distribusi) barang hasil industri	Pengembangan kemitraan usaha untuk perluasan akses usaha*)	APBD	Dinas Koperasi. UMKM	Ekonomi
2	Peningkatan kuantitas sarana prasarana seperti pengembangan pasar, koperasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan letaknya yang strategis.	Penyediaan modal usaha untuk mendukung perkembangan ekonomi	APBD	Dinas Koperasi. UMKM	Ekonomi
		Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi*)	APBD	Dinas Koperasi. UMKM	Ekonomi
3	Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung usaha masyarakat	Penyediaan program-program pinjaman dari lembaga keuangan dengan bunga lunak	APBD	Dinas Koperasi. UMKM	Ekonomi
5	Peningkatan potensi ekonomi kecamatan.	Pengembangan potensi pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian	APBD	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ekonomi
		Pengembangan potensi pariwisata melalui promosi dan pemasaran	APBD	Dinas Pariwisata	Ekonomi
IV Sarana Pendidikan					
1	Pengembangan sarana pendidikan melalui peningkatan kualitas maupun kuantitasnya untuk pemerataan pelayanan pendidikan skala kota.	Pengembangan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan *)	APBN dan APBD	Dinas Pendidikan	Pendidikan
		Pengembangan mata pelajaran (muatan lokal) yang tepat untuk mendukung pengembangan potensi lokal	APBD	Dinas Pendidikan	Pendidikan
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan	APBD	Dinas Pendidikan	Pendidikan
		Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah SD/SMP/SMA		DPU dan Tata Ruang	Pendidikan

No.	Strategi	Kegiatan	Sumber pendanaan	SKPD	Keterangan
2	Peningkatan teknologi untuk menciptakan kreativitas masyarakat guna terciptanya lapangan pekerjaan baru.	Penambahan teknologi baru/teknologi tepat guna dalam pengembangan potensi lokal	APBD	Dinas Pendidikan	Pendidikan
3	Penambahan sekolah-sekolah kejuruan dengan lulusan yang siap kerja	Pengembangan sekolah baru dengan jurusan baru yang berbasis pada keterampilan. Penyediaan sarana pra-sarana pendukung kegiatan sesuai dengan kejurumannya. misalnya laboratorium*)	APBD APBN. APBD	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	Pendidikan Pendidikan
4	Mengembangkan kursus-kursus ketampilan dan lembaga pendidikan informal lainnya untuk mengasah potensi masyarakat	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja. Peningkatan mutu Lembaga Pelatihan Kerja (lembaga pendidikan informal*)	APBD APBD	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	Pendidikan Pendidikan
V Kesehatan					
1	Pengembangan sarana kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Salem	Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Salem*)	APBD. APBN. BLN	Dinas Kesehatan	Kesehatan
2	Peningkatan tenaga medis yang handal untuk mengoptimalkan kualitas kesehatan masyarakat	Menjalin Kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas dokter dan paramedis*)	APBD	Dinas Kesehatan	Kesehatan
3	Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya hidup sehat	Pengembangan promosi dan informasi sadar hidup sehat bagi masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi*)	APBD	Dinas Kesehatan	Kesehatan
4	Pengembangan kelembagaan dan tenaga kesehatan di tiap desa	Penambahan/pengadaan Bidan Desa*) Pembangunan PKD/pos kesehatan di setiap desa	 APBD	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	Kesehatan Kesehatan
VI Jaringan listrik					
1	Penambahan lampu-lampu penerangan di tempat-tempat tertentu guna mendukung kegiatan masyarakat	Perbaikan/pemeliharaan lampu jalan di area rawan kecelakaan dan rawan kejahatan*)	APBD	DPU dan Tata Ruang	Ekonomi
2	Peningkatan jaringan listrik untuk pemerataan pelayanan	Penyusunan Rencana Umum Kebutuhan Listrik Perluasan dan peningkatan kapasitas penyediaan listrik (pengembangan stasiun relai listrik)	APBD APBD	Bappeda Dinas Pengairan. Energi dan Sumberdaya Mineral	 Ekonomi
3	Peningkatan daya untuk mendukung perkembangan industri	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan yang dikhususkan untuk kegiatan industri.	APBD	Dinas Pengairan. Energi dan Sumberdaya Mineral	Ekonomi

No.	Strategi	Kegiatan	Sumber pendanaan	SKPD	Keterangan
		Penambahan daya listrik untuk di alokasikan pada jaringan distribusi kegiatan industri	APBD	Dinas Pengairan. Energi dan Sumberdaya Mineral	Ekonomi
4	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk hemat listrik (tepat guna)	Pembinaan kepada masyarakat tentang sistem dan cara-cara menghemat listrik*)	APBD	Dinas Pengairan. Energi dan Sumberdaya Mineral	SDM
VII Jaringan Telepon/Telekomunikasi					
1	Pengembangan jaringan telepon dan internet untuk mempercepat penyampaian informasi bagi masyarakat.	Pembinaan dan pengembangan bidang telepon dan telematika lain untuk mendukung informasi masyarakat*)	APBD	Dishubkominfo	Ekonomi
2	Pengembangan jaringan baru untuk pemerataan pelayanan	Koordinasi pengembangan sambungan/jaringan telepon baru (pengembangan stasiun relai).	APBD	Dishubkominfo	Ekonomi
VIII Jaringan Drainase dan Irigasi					
1	Peningkatan kondisi dan kualitas jaringan drainase menjadi sistem drainase permanen	Pembangunan Saluran Drainase Selokan Jalan Utama *)	APBD	DPU dan Tata Ruang	
		Perbaikan saluran untuk meningkatkan kelancaran aliran air	APBD	DPU dan Tata Ruang	
2	Peningkatan manajemen pengelolaan jaringan drainase (individu/komunal)	Koordinasi pengembangan jaringan drainase	APBD	DPU dan Tata Ruang	
3	Pengoptimalan pengembangan sistem jaringan drainase untuk mencegah terjadinya kondisi lingkungan yang buruk seperti pembuatan talud permanen. dsb.	Pembuatan talud permanen untuk mendukung kinerja jaringan drainase *)	APBD	DPU dan Tata Ruang	
4	Pengembangan sistem drainase yang bisa bermanfaat bagi perindustrian	Pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase yang tidak <i>overlay</i> dengan pengembangan jaringan sanitasi (limbah industri)		DPU dan Tata Ruang	
5	Peningkatan sarana dan prasarana irigasi	Rehabilitasi jaringan irigasi di desa-desa *)		Dinas Pengairan. Energi dan Sumberdaya Mineral	Ekonomi
IX Jaringan Air Bersih					
1	Peningkatan pengelolaan sumber mata air sebagai bahan baku pemenuhan air bersih dan industri.	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air *)	APBD	Kantor Lingkungan Hidup	Kesehatan
		Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya*)		DPU dan Tata Ruang	Kesehatan
2	Peningkatan jaringan dari segi kualitas (perpipaan/non perpipaan) dan kuantitas (jumlah pipa)	Pengecekan jaringan distribusi air bersih (perpipaan) dari resiko kebocoran		DPU dan Tata Ruang	Ekonomi

No.	Strategi	Kegiatan	Sumber pendanaan	SKPD	Keterangan
4	Pengembangan sarana pengolahan air bersih, seperti pembuatan Instalasi pengolahan air, sumur bor, dsb	Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih	APBD	DPU dan Tata Ruang	Kesehatan
		Penyusunan master plan pengembangan sarana pengolahan air minum*)		DPU dan Tata Ruang	Kesehatan
		Pembangunan instalasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU dan Tata Ruang	Kesehatan
X	Jaringan Jalan				
1	Peningkatan kualitas jalan untuk memperlancar gerak distribusi barang misalnya distribuhasil pertanian ke daerah sekitar	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan *)	APBD	DPU dan Tata Ruang	Ekonomi
2	Pengembangan trayek angkutan untuk memobilisasi ruang gerak masyarakat secara cepat dan menjangkau seluruh pelosok kecamatan Salem	Pengembangan jaringan angkutan penumpang dan angkutan barang	APBD	DPU dan Tata Ruang	Ekonomi
3	Penambahan/pengembangan trayek angkutan baru untuk mewujudkan pelayanan transportasi secara merata	Pengembangan angkutan/moda untuk yang disesuaikan dengan trayeknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	APBD	Dishubkominfo	Ekonomi
4	Pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Penyusunan program pengembangan jaringan jalan lintas wilayah kabupaten/provinsi Cilacap - Brebes - Kuningan (Cibening) *)	APBD	DPU dan Tata Ruang	Ekonomi
		Pengadaan Tanah dan Perbaikan terminal Kecamatan Salem *)	APBD	Dishubkominfo	Ekonomi
		Pemeliharaan sarana dan fasilitas transportasi	APBD	Dishubkominfo	Ekonomi
		Pengadaan dan pemeliharaan PJU	APBD	Dishubkominfo	

Keterangan: *) Program terdapat di RPJM Kabupaten Brebes, Renstra Kecamatan
Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2009



Gambar 2. Posisi Strategis Kecamatan di Kabupaten Brebes